

POTENSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KUALA ENOK PROVINSI RIAU DAN DAMPAK EKONOMI DAERAH**Firdaus Hamta¹✉, Rahman Hasibuan², Mulyadi³, Sabri⁴**Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan ^{1), 2)}Fakultas Ekonomi, Universitas Ibnu Sina ^{3), 4)}**Info Artikel**

Diserahkan Mei 2020
Diterima Juni 2020
Diterbitkan September
2020

Kata Kunci:

*Kawasan Ekonomi Khusus,
Interaksi Ekonomi*

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui potensi Kuala Enok Provinsi Riau menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dampak terhadap ekonomi daerah. Objek pengamatan adalah potensi pengusulan KEK, dukungan pemerintah, lokasi strategis, tata ruang, pengembangan KEK, potensi investasi. Metode analisis kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data studi lapangan, wawancara dengan informan, penelusuran informasi secara online. Hasil penelitian bahwa (1) pelabuhan Samudera Kuala Enok merupakan wilayah yang strategis dan memiliki beberapa kapasitas penunjang untuk menjadi kawasan KEK, namun masih membutuhkan penguatan aspek manajemen dan operasional administrator KEK, rencana anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan anggaran pendukung lainnya, rencana perkiraan dan jadwal pembiayaan proyek, road map kebijakan fiskal di kawasan KEK, penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kajian Financial Internal Rate of Return (FIRR) dan Financial Net Present Value (FNPV); (2) penerapan KEK di Kuala Enok dapat berdampak terhadap iklim usaha dan mendorong multiplier effect terhadap perekonomian daerah melalui terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan pemerintah dan pendapatan perkapita masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan industri dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

© 2020 Indonesia

e-ISSN: 2548-9909

✉ Alamat Korespondensi:

Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan

Jl. Pahlawan No.99, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425

E-mail: firdaus.hamta@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Potensi dan permasalahan ekonomi negara-negara berkembang yang variatif memerlukan pola perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sesuai permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara tersebut. Sadono Sukirno (2014) bahwa ekonomi pembangunan merupakan analisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan perlu kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Kuala Enok merupakan wilayah pesisir dan merupakan ibu kota kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Luas wilayah Kuala Enok 11.900 km² dengan populasi penduduk 3.554 jiwa dari 31.462 jiwa se-Kecamatan Tanah Merah.

Produktivitas masyarakat Kuala Enok bergantung dari hasil laut dan tangkap ikan serta jasa transportasi laut skala kecil dengan keterbatasan peralatan, modal dan sumber daya lainnya. Sementara itu, hasil perkebunan kelapa masyarakat cenderung turun dan beberapa perusahaan industri tidak beroperasi sehingga mempersempit lapangan kerja dan mendorong kemiskinan di masyarakat.

Permasalahan kemiskinan di masyarakat pesisir karena umumnya bergantung terhadap hasil laut dan tangkap ikan sebagai penghasilan utama, maka wilayah pesisir umumnya merupakan terkonsentrasinya kemiskinan karena rendahnya produktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hasil penelitian Hamta (2016) bahwa keberlanjutan penghasilan rumah tangga masyarakat pesisir merupakan persoalan serius karena dipengaruhi oleh produktivitas ekonomi yang terbatas.

Kuala Enok merupakan daerah pesisir memiliki potensi sumber daya alam seperti hasil laut dan perikanan serta lahan industri. Kedalaman laut Kuala Enok dapat dilalui kapal tanker kapasitas 15.000-35.000 ton. Industri dan jasa dapat menjadi sektoral di Kuala Enok untuk berkembang dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial dalam proses pembangunan ekonomi daerah. M.L. Jhingan (2012) bahwa sumber pembangunan ekonomi meliputi kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya.

Proses pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki khususnya di daerah pesisir, hasil penelitian Hamta (2018) bahwa perlunya dukungan program pemerintah dari rehabilitasi rumah layak huni ke program yang dapat mendorong produktivitas dan perilaku ekonomi rumah tangga untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Potensi geografis dan ketersediaan lahan di Kuala Enok dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah dan mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pentingnya KEK bagi masyarakat Kuala Enok dapat membuka fleksibilitas ekonomi lebih luas, membuka lapangan kerja baru dan menstimulus produktivitas masyarakat. Hamta (2017) hasil penelitiannya bahwa rumah tangga masyarakat di pesisir membutuhkan ketahanan pangan melalui produktivitas selain dari hasil melaut.

KEK merupakan upaya mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, dipelajari peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Indikator untuk menjadi KEK terdiri dari: (1) adanya pengusul dari pihak perusahaan, pemerintah daerah; (2) dukungan pemerintah daerah; (3) lokasi strategis; (4) tata ruang; (5) pengembangan KEK; (6) potensi investasi (sumber: kek.go.id).

Potensi KEK di Kuala Enok dapat menjadi unsur pendukung utama terjadinya perubahan sistem pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Arsyad (2015) bahwa unsur-unsur pokok pembangunan ekonomi: (1) perubahan yang terjadi kontinu; (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita; (3) peningkatan pendapatan perkapita berlangsung dalam jangka panjang; (4) perbaikan sistem kelembagaan diselenggarakan di bidang (ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya) yang ditinjau dari aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of game*) dan organisasi (*players*).

Kuala Enok berbatasan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Riau, berbatasan dengan provinsi Kepulauan Riau dan Jambi serta memiliki infrastruktur pelabuhan samudera yang bermuara pada Selat Berhala dan Selat Malaka dan didukung aksesibilitas jalan darat. Kapasitas sumber daya alam dan letak geografi yang strategis tersebut dapat mendukung distribusi dan pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di Provinsi Riau sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia dan dapat mendorong peningkatan interaksi ekonomi antar wilayah dan internasional melalui perhubungan laut.

Pembangunan ekonomi daerah yang tepat, sesuai karakteristik dan permasalahan yang dihadapi, maka tidak hanya berimplikasi terhadap perbaikan ekonomi tetapi juga terhadap sumber daya manusia. Teori Gunal Mrdal (1970) dalam Therisia, dkk (2014) bahwa pembangunan ekonomi terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup: (1) hasil dan pendapatan; (2) tingkat produktivitas; (3) tingkat kehidupan; (4) sikap dan pranata; (5) rasionalitas.

Potensi pengembangan KEK di Kuala Enok diharapkan meningkatkan investasi, ekspor dan pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alkadri (2011) bahwa pengembangan KEK dapat meningkatkan investasi, ekspor (devisa), penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, pemanfaatan sumber daya lokal. percepatan pembangunan wilayah. Makalew, dkk (2017) bahwa pengembangan industri menengah KEK memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi industri menengah pada struktur ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hariani, Silvia (2015) bahwa KEK berpotensi menjadi pusat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Optimalisasi sumber daya ekonomi di berbagai KEK di Indonesia terdapat potensi kesenjangan terhadap ekonomi dan sosial di masyarakat dan daerah tersebut.

Kontradiksi hasil penelitian yang relevan yaitu oleh Sihalohe, Muna (2010) bahwa dampak negatif pembentukan KEK yaitu biaya sosial yang tidak bisa dihitung seperti transfer sumber daya, akuisisi lahan, hilangnya lahan pertanian dan kemungkinan terjadinya disparitas ekonomi regional. Dede Sri Kartini, dkk (2017) bahwa hanya masyarakat yang memiliki modal saja yang dapat menikmati kebijakan KEK.

Rencana strategis pembangunan ekonomi di Kuala Enok, perlu diketahui bagaimana potensi Kuala Enok untuk menjadi KEK dan dampaknya terhadap perekonomian daerah dengan karakteristik yang dimiliki. Dani Rodrik (2013) bahwa KEK mampu menjadi alat yang berguna membantu negara-negara untuk berhasil dalam strategi peningkatan industri yang dapat dengan mudah meningkatkan pertumbuhan Ekonomi.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang di observasi. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011). Metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2011) suatu metode dalam meneliti status sekelompok

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Informan penelitian ini sebanyak 14 (empat belas), terdiri dari: (1) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki kapasitas sebagai salah satu penyusun kebijakan dan administratif pemerintah Provinsi Riau, pengalaman dalam kajian kawasan ekonomi khusus di Batam dan merupakan putra daerah dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau; (2) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang berkapasitas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki kewenangan dan informasi tentang perencanaan pembangunan daerah salah satu yang mendorong penerapan KEK di Kuala Enok; (3) Kantor Pelabuhan Kuala Enok yang memiliki otoritas pengawasan kegiatan kepelabuhanan khususnya di Kuala Enok; (4) Mantan Kepala Desa Kuala Enok yang memiliki pengetahuan tentang daerah dan memiliki informasi luas tentang pembangunan pelabuhan samudera Kuala Enok; (5) tokoh pemuda dan aktivis yang memiliki informasi hasil pengamatan tentang fenomena pembangunan daerah di Kuala Enok.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi lapangan, wawancara dan penelusuran data secara *online* (internet).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Observasi Potensi KEK Kuala Enok Riau

Pengusul KEK

Kapasitas pelabuhan samudera di Kuala Enok saat ini memiliki 2 (dua) terminal (dermaga) untuk tambat kapal tanker dengan luas lahan 20 ha, terdapat lahan yang dapat dikembangkan seluas ± 5203 ha.

Sekitar kawasan perlabuhan samudera secara topografik dan secara umum merupakan tanah datar dan rawa-rawa khususnya di hulu kawasan dan merupakan hutan yang potensial menjadi perluasan kawasan. Kawasan ini telah ditinjau oleh pemerintah pusat, Gubernur Riau Provinsi Riau, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati), beberapa perusahaan swasta dan BUMN maka terdapat potensi dilakukan pengusulan menjadi KEK oleh pihak perusahaan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Provinsi Riau.

Bidang usaha di lokasi KEK dapat menjadi kawasan pelabuhan dan komersial untuk pengelolaan kepelabuhanan, pengelolaan curah CPO dan berpotensi untuk perkebunan kelapa (kopra), pergudangan (logistik).

Kawasan terdekat terdapat potensi pertambangan batu bara di Kecamatan Kemuning, perkebunan kopra masyarakat Kuala Enok, pergudangan hasil tangkap ikan/perikanan

masyarakat dan terdapat industri pengolahan kelapa (Kopra) yakni PT. Pulau Sambu.

Dukungan Pemerintah

Infrastruktur pelabuhan samudera dibangun melalui dukungan pemerintah pusat sejak tahun 1990. Perkembangan selanjutnya kawasan pelabuhan samudera tersebut pada tahun 2009 Kuala Enok dicanangkan sebagai kawasan industri hilir pertanian dan ditetapkan sebagai KEK berbasis CPO.

Tahun 2015 Kuala Enok diusulkan masuk kawasan poros maritim Indonesia dan ditetapkan sebagai kawasan strategis oleh Pelindo I.

Tahun 2019 mendapat dukungan Gubernur se-sumatera untuk percepatan menjadi KEK. Tahun 2020 menjadi pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan DPR RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembangunan dan pengembangan jalan darat yang menghubungkan pelabuhan samudera ke Tembilahan (pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau) dan terintegrasi ke daerah lainnya.

Pemanfaatan pelabuhan samudera dan KEK di Kuala Enok masih membutuhkan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan operasional sebesar ±300 miliar, pembangunan infarastruktur jalan penunjang ±300 miliar serta kebutuhan anggaran lainnya ±400 miliar.

Dukungan kebijakan pemerintah lainnya yang dibutuhkan dapat dalam bentuk insentif fiskal untuk menarik investasi sebagai kawasan KEK, diantaranya *tax holiday*, bea masuk impor kebutuhan peralatan, kebijakan pajak daerah, retribusi serta dukungan terhadap pembebasan lahan.

Lokasi Strategis

Pelabuhan samudera beririsan langsung dengan kawasan yang potensial menjadi kawasan KEK. Sekitar kawasan terdapat pelabuhan domestik, pelabuhan rakyat dengan jarak 500 m sampai 2 km.

Kondisi geografis Kuala Enok terletak di daratan Riau dan bermuara pada laut lepas (Selat Berhala dan Selat Malaka), maka posisi pelabuhan samudera Kuala Enok dapat membuka aksesibilitas pasar dari komoditas perkebunan, jasa transportasi laut skala besar dan pengolahan komoditas lainnya baik dari daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau maupun kabupaten lain dan provinsi lainnya. Akses jalan darat terdekat adalah Kecamatan Enok ± 20 km dan pusat pemerintah kabupaten yakni kota Tembilahan ± 48 km.

Dukungan infrastruktur bandara dapat di tunjang dari bandara domestik di Tembilahan dan kota Jambi (sekitar 114 km).

Ketersediaan infrastruktur/fasilitas umum di Kuala Enok telah didukung ketersediaan Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan potensial dilakukan kemitraan dengan PT. Pulau Sambu (perusahaan swasta) yang mengoperasikan pembangkit listrik secara mandiri dengan menggunakan turbin.

Kebutuhan dan ketersediaan sumber daya air umumnya menggunakan air minum dari hasil penampungan air hujan, pompa air tanah, air yang pernah distribusikan oleh PT. Pulau Sambu melalui penampungan air hujan (DAM). Ketersediaan bahan bakar seperti gas, bensin, solar disuplai dari pertamina di Pekanbaru.

Kuala Enok dan sekitar wilayah terdapat potensi sumber daya alam dan unggulan daerah, seperti di wilayah kecamatan lainnya (terdekat) terdapat potensi pertambangan batu bara di kecamatan Kemuning, minyak di Kerintang, hasil perkebunan kopra, pertanian (pangan) dan peternakan. Hasil laut (tankap ikan) sudah menjadi komoditas ekspor ke Malaysia dan Singapura dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Garis besar jarak antara Kuala Enok dengan wilayah sekitar digambarkan berikut ini.



Gambar 1. Jarak Kuala Enok dengan antar Wilayah

Tata Ruang

Status kepemilikan tanah di kawasan yang potensial menjadi KEK ±20% - 35% dalam status penguasaan lahan dan belum terdapat lahan dalam status sengketa.

Rencana tata ruang wilayah ditentukan sebagai kawasan pelabuhan dan komersial, seperti jasa transportasi laut, logistik/pegudangan, pengolahan curah CPO. Namun berpotensi pengembangan perkebunan, perikanan dan industri/pengolahan lainnya.

Pengembangan KEK

Rencana penggunaan lahan atau zonasi dapat difungsikan ruas jalan, lahan terbuka hijau, aksesibilitas laut, infrastruktur gedung untuk

kebutuhan manajemen dan administrasi pengelolaan KEK, perhotelan dan industri pengolahan, karena telah didukung infrastruktur pelabuhan samudera sebagai penunjang transportasi kapal laut kapasitas besar dan dapat difungsikan menjadi pelabuhan khusus KEK.

Daerah ini telah memiliki sarana komunikasi Telkom dan *celluler* lainnya seperti Telkomsel, Satelindo. Pengembangan KEK di Kuala Enok dapat memberdayakan masyarakat setempat untuk dilibatkan menjadi tenaga kerja.

Jaringan jalan darat merupakan jalan raya yang telah terhubung dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, namun membutuhkan pengaspalan ±62 km yang menghubungkan ke daerah Bagan Jaya Kecamatan Enok, Tembilahan dan Pekanbaru. Lintasan jalan tersebut masih membutuhkan penerangan jalan.

Dampak lingkungan jika dikembangkan sebagai KEK, bahwa terhadap flora dan fauna sangat kecil, dampak penebangan hutan dan kerusakan tanah tidak signifikan dan secara sosial tidak merusak komoditas dan mata pencaharian masyarakat setempat, maka eksistensi KEK dapat membuka pasar baru, produktivitas dan diversifikasi produk serta daya saing daerah.

Potensi Investasi

Kawasan pelabuhan samudera di Kuala Enok telah disurvei oleh pihak swasta, BUMN dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk membangun kemitraan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara Pemerintah Povinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga dinamika ini berpotensi mendapatkan investasi.

Konsistensi dan komitmen masih diperlukan untuk menstimulus dukungan pembiayaan pengembangan infrastruktur pelabuhan samudera dan pengembangan jalan darat melalui sumber dana pembiayaan APBN, APBD Provinsi Riau serta APBD kabupaten Indragiri Hilir dan kemitraan dengan Kabupaten lainnya.

3.2. Dampak Pembangunan Ekonomi Daerah

Ketersediaan lahan di Kuala Enok jika dilakukan pengembangan KEK dapat menjadi salah satu pusat kawasan industri di wilayah selatan Provinsi Riau. Kondisi geografis yang merupakan jalur nasional dan internasional dan kapasitas laut serta adanya infrastruktur pelabuhan samudera dapat mendukung kepadatan lalu lintas dermaga Pelindo di Dumai, sehingga berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan lalu lintas barang antar daerah, nasional dan ekspor dan impor.

Pelabuhan Samudera dan kawasan KEK di Kuala Enok dapat diperuntukkan kawasan pelabuhan, pengolahan curah atau industri CPO,

perkebunan dan industri kopra, perikanan, jasa transportasi dan logistik/pergudangan.

Potensi lalu lintas laut dan darat yang menghubungkan daerah di provinsi Riau dan provinsi lainnya akan mendorong peningkatan interaksi ekonomi antar daerah/wilayah seperti sektor perdagangan dan jasa, karena posisi daerah ini dapat mendorong daya saing daerah melalui efisiensi biaya distribusi barang.

Sumber daya alam di sekitar kawasan terdekat terdapat produktivitas masyarakat di sektor perikanan dan perkebunan serta jasa, maka eksistensi KEK di Kuala Enok dapat berdampak *multiplier effect* terhadap ekonomi daerah.

Dampak KEK terhadap perekonomian daerah melalui tahapan peningkatan investasi dan produktivitas yang bernilai ekonomi, mendorong terjadinya transfer teknologi dan skill, sehingga dampak *multiplier effect* tersebut akan membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan pemerintah dan pendapatan perkapita masyarakat daerah, pertumbuhan industri dan diversifikasi produk, mendorong iklim usaha yang baik, peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah, maka KEK akan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Garis besarnya seperti gambar berikut ini.



Gambar 2. Dampak KEK Terhadap Ekonomi Daerah

4. Pembahasan

Secara geografis dan kapasitas lahan Kuala Enok sangat strategis dan telah didukung pelabuhan samudera dan sarana prasarana publik seperti listrik, jaringan telekomunikasi, infrastruktur jalan darat, ketersediaan bahan bakar, ketersediaan sumber daya unggulan dari produktivitas daerah, berpeluang untuk dilakukan pengembangan kebutuhan air, maka Kuala Enok dari aspek ini berpotensi menjadi KEK dibidang usaha kepelabuhanan dan logistik, industri dan pengolahan curah CPO serta komersial lainnya dan strategis menjadi kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Rencana KEK di Kuala Enok belum diperkuat identitas untuk mengajukan usulan menjadi KEK. inkonsistensi terhadap pembangunan aksesibilitas jalan darat yang menghubungkan pelabuhan samudera dengan daerah lainnya, sehingga sampai saat ini infrastruktur pelabuhan samudera dan infrastruktur jalan darat tersebut menjadi mangkrak.

Konsistensi dan komitmen untuk pengembangan pelabuhan samudera dan kawasan KEK di Kuala Enok masih dibutuhkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah baik provinsi Riau maupun pemerintah kabupaten untuk pembangunan infrastruktur dasar maupun untuk penunjang lainnya untuk menunjang kelayakan menjadi KEK.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian disimpulkan sebagai berikut:

1. Kuala Enok merupakan wilayah yang strategis dan memiliki beberapa kapasitas penunjang untuk menjadi kawasan KEK di bidang usaha kepelabunan, pergudangan (logistik) dan pengolahan curah CPO. Potensi lainnya adalah perkebunan atau industri kelapa (kopra) dan perikanan. Beberapa strategi yang dibutuhkan untuk mempercepat pengusulan KEK di Kuala Enok adalah perencanaan manajemen dan operasional administrator KEK, rencana anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pendukung lainnya, rencana perkiraan dan jadwal pembiayaan proyek, *road map* kebijakan fiskal dalam fasilitas KEK, penguatan RTRW, kajian *Financial Internal Rate of Return (FIRR)* dan *Financial Net Present Value (FNPV)*.
2. Penerapan KEK di Kuala Enok akan berdampak terhadap iklim usaha dan mendorong *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah melalui terbukanya lapangan kerja baru, pendapatan pemerintah daerah, pendapatan perkapita masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan industri dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Bapak Hijazi, SE. M. Si (Sekda Pemerintah Provinsi Riau periode tahun 2017-2019), kantor Pelabuhan Kuala Enok, tokoh masyarakat Kuala Enok, tokoh pemuda dan aktivisi Kuala Enok, Bapak Bisri Kamal Mustofa, civitas akademika Universitas Riau Kepulauan Batam dan Universitas Ibnu Sina Batam.

Daftar Pustaka

- Alkadri. 2011. *Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 13, No. 1.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. *Sosial dan Kependudukan*. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 22.15 WIB.
- Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. *Kawasan Ekonomi Khusus*. <https://kek.go.id/kek-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 23.40 WIB.
- Hamta. F. 2018. *Model Development of Household Well-Being of Resource-Based Coastal Fishing Coastal Maritime In the Riau Islands Province*. *Archives of Business Research*– Vol.6, No.6.
- Hamta. F. 2017. *Analisis Faktor Perilaku Ekonomi Berkelanjutan pada Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil di Pesisir Batam*. *Equilibria* Vol 4 No. 2.
- Hamta. F. 2016. *Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil di Pesisir Batam*. *Equilibria* Vol 3 No. 2.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartini, Sri, Dede dkk. 2017. *Kapitalisme Pedesaan di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten*. *Cosmogov*, Vol.3 No.1.
- Makalew, Natali, Victoria dkk. 2017. *Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol 19. No 2.
- Nazir. Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rodrik, Dani 2013. *Structural Change, Fundamentals and Growth: an Overview*. *Institute for Advanced Study*.
- Silvia, Efen, Hariani, Prawidya. 2015. *Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun*. *Jurnal Ekonomikawan*. V15. 1028.
- Sihaloho, Tumpal, Muna, Naufa. 2010. *Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 4 No. 1- 75.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, 2014. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Theresia, Aprillia dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.